

**PENYEMPURNAAN PENGUKURAN KONTRIBUSI  
PARIWISATA:  
ALTERNATIF PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
INDONESIA**

*Improvement on the Measurement of Tourism Contribution: An  
Alternative to Accelerating Indonesia's Economic Growth*

**Akhmad Mun'im<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Direktorat Neraca Produksi

Badan Pusat Statistik

Jalan dr. Sutomo No 6-8, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia 10710

Indonesia

amunim@bps.go.id

Diterima: 04 April 2022. Disetujui: 28 Mei 2022. Dipublikasikan: 30 Juni 2022

**Abstrak**

*United Nations World Tourism Organization (UNWTO) merekomendasikan International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS) dan Tourism Satellite Accounts: Recommended Methodological Framework (TSA:RMF) 2008 sebagai manual standar dalam penghitungan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) selaku kantor statistik nasional di Indonesia mengadopsi rekomendasi tersebut dalam menghitung kontribusi pariwisata di Indonesia sehingga kontribusi pariwisata Indonesia dapat dibandingkan dalam tataran global. Adopsi tersebut sekaligus menyempurnakan metode penghitungan kontribusi pariwisata yang sebelumnya dilakukan dengan pendekatan *shock* pada tabel *input-output* menjadi pendekatan *supply-demand* dengan menggunakan kerangka *supply and use table* (SUT). Dengan menggunakan kerangka SUT, disusun penyediaan produk-produk pariwisata yang dihasilkan oleh industri pariwisata dan industri non pariwisata. Dengan menyandingkannya bersamaan dengan konsumsi pariwisata internal, diperoleh besaran kontribusi pariwisata. Hasil penghitungan menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi pariwisata Indonesia selama tahun 2016-2019. Dilihat dari besaran *tourism direct gross domestic product* (TDGDP), sektor pariwisata berkontribusi sekitar 4,6 – 4,9 persen terhadap PDB Indonesia.*

**Kata Kunci:** kontribusi pariwisata, SUT, TDGDP

**Abstract**

*The United Nations World Tourism Organization (UNWTO) recommends International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS) and Tourism Satellite Accounts:*

*Recommended Methodological Framework (TSA: RMF) 2008 as standard manuals for calculating tourism contributions to the Gross Domestic Product (GDP). The Statistics Indonesia-BPS, as a national statistical office in Indonesia, adopted these recommendations in measuring tourism contribution in Indonesia. So, it manages in comparison with a global level. This adoption also improves the method of calculating tourism contributions conducted previously using a shock approach in the input-output table to a supply-demand by using the supply and use table (SUT) framework. The SUT framework arranges the provision of tourism products produced by the tourism and non-tourism industries. By juxtaposing it with internal tourism consumption, the tourism contribution is achieved. The calculation results show an increasing trend of Indonesia's tourism contribution from 2016 to 2019. Judging from the tourism direct gross domestic product (TDGDP), the tourism sector contributes 4.6 to 4.9 percent of the Indonesian GDP.*

**Keywords:** *contribution of tourism, SUT, TDGDP*

© 2022 Direktorat Kajian Strategis

## **PENDAHULUAN**

Posisi geografis yang strategis menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Dengan jumlah pulau lebih dari 17.540 pulau yang dihuni oleh beragam suku dengan latar budaya yang heterogen, Indonesia menjadi negara yang menarik dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Posisi Indonesia yang diapit dua benua dan dua samudera, serta iklim tropis yang dimilikinya, menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata favorit bagi wisatawan mancanegara. Dengan kata lain, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor pariwisatanya.

Merujuk pada agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020—2024, peningkatan nilai tambah pariwisata merupakan salah satu prioritas pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan *net* ekspor (jasa) dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah mencanangkan beberapa target pariwisata yang diamanatkan dalam agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020—2024 yang mencakup peningkatan nilai tambah dan investasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi, serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Pariwisata merupakan sektor yang penting mengingat perannya dalam penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa negara, serta mendukung pertumbuhan PDB (Yakup, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tren kunjungan wisatawan di Indonesia selalu meningkat. Pada tahun 2010, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) berjumlah lebih dari 7 juta kunjungan dan meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 terdapat lebih dari 16 juta kunjungan wisman ke Indonesia. Pada periode yang sama, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pun menunjukkan tren peningkatan meskipun terjadi fluktuasi selama periode 2010—2019. Kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berpotensi mendorong

terciptanya lapangan usaha di sekitar objek wisata tersebut sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya (Mardianis & Syartika, 2018).

Berdasarkan perkembangan jumlah wisatawan tersebut, percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, serta harmonisasi peraturan pemerintah perlu digalakkan guna menunjang pengembangan sektor pariwisata Indonesia. Penyiapan data-data pariwisata dilakukan untuk meningkatkan akurasi pencapaian target sebagaimana tertuang pada agenda pembangunan. Tersedia indikator makro yang terukur sehingga dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi pariwisata dalam perekonomian serta dapat dibandingkan pada skala global menjadi isu dasar pentingnya penghitungan kontribusi pariwisata yang berbasis rekomendasi internasional.

Urgensi penghitungan kontribusi pariwisata telah lama disadari pemerintah. Melalui kementerian dan lembaga terkait, bekerjasama dengan BPS, pemerintah memperkirakan kontribusi pariwisata melalui pendekatan *shock* yang dilakukan pada kerangka tabel *input-output* (BPS, 2019). *Framework* tersebut menjelaskan keterkaitan antarkegiatan ekonomi yang ditunjukkan melalui transaksi barang dan jasa yang digambarkan di dalamnya (Zuhri, 2019). Model ini menjelaskan dampak perubahan *output* ekonomi akibat adanya perubahan (*shock*) yang diberikan pada sisi permintaan akhir ekonomi yang mencakup pengeluaran akhir rumah tangga, pengeluaran akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan ekspor (Malba & Taher, 2016).

Penghitungan kontribusi pariwisata yang sebelumnya berbasis tabel *input-output*, menggunakan besaran *shock* yang diperkirakan dari nilai konsumsi dan pengeluaran pemerintah serta belanja investasi pada sektor-sektor pariwisata. Dengan memasukkan besaran *shock* tersebut ke dalam matriks Leontief invers dari tabel I-O Indonesia, didapat besaran dampak total yang selanjutnya disetarakan dengan nilai kontribusi pariwisata.

Seiring dengan berkembangnya standar dan manual rekomendasi internasional, PBB melalui *United Nation World Tourism Organisation* (UNWTO) merekomendasikan *International Recommendations for Tourism Statistics* (IRTS) dan *Tourism Satellite Accounts: Recommended Methodological Framework* (TSA:RMF) 2008 sebagai manual dalam menghitung kontribusi pariwisata. Keduanya mengacu pada manual *System on National Account* (SNA) 2008 sehingga konsep, pendekatan, dan rekomendasi yang tercantum pada IRTS maupun TSA:RMF konsisten dengan konsep dan pendekatan yang dilakukan dalam menyusun neraca nasional. Kedua manual tersebut menunjukkan mekanisme yang jelas terkait aliran nilai pengeluaran dan konsumsi wisatawan hingga akhirnya dapat diturunkan menjadi kontribusi pariwisata. Selain itu, IRTS dan TSA:RMF juga menjelaskan bahwa kontribusi pariwisata dihitung melalui kerangka *Supply and Use Table* (SUT) yang menjabarkan keseimbangan *supply* (penyediaan) dan *demand* (permintaan) sektor-sektor pariwisata.

Kajian ini menjelaskan bagaimana BPS menyempurnakan penghitungan kontribusi pariwisata dengan membandingkan metode penghitungan saat ini yang berbasis SUT dengan metode sebelumnya yang menggunakan analisis dampak tabel *input-output*.

## METODE

Kajian ini menjelaskan bagaimana BPS menghitung kontribusi pariwisata sesuai manual internasional yang direkomendasikan. Sebelumnya, BPS menggunakan kerangka tabel *input-output* untuk menghitung dampak adanya perubahan *shock* permintaan akhir pada sektor-sektor pariwisata terhadap perubahan *output* ekonomi Indonesia. Dampak tersebut selanjutnya disetarakan sebagai kontribusi pariwisata terhadap total ekonomi.

Tabel *input-output* sesungguhnya merupakan suatu alat (*tools*) analisis dalam membangun model keseimbangan umum (*general equilibrium*) seperti *Social Accounting Matrixes* (SAM) maupun *Computable General Equilibrium* (CGE). Tabel *input-output* menawarkan informasi yang komprehensif dan rinci mengenai penjualan dan pembelian barang dan jasa di antara berbagai sektor ekonomi. Keunggulan metode ini menjadikan tabel *input-output* lebih sesuai digunakan sebagai alat analisis bagi para ekonom, perencana dan pembuat kebijakan.

Agar dapat digunakan sebagai alat analisis dampak, tabel *input-output* perlu ditransformasi menjadi model analisis. Langkah pertama adalah mengubah transaksi antarsektor menjadi matriks *A* yang menunjukkan kebutuhan langsung suatu sektor untuk menghasilkan satu unit produknya. Matriks *A* disebut matriks koefisien teknis langsung. Koefisien teknis dihitung dari nilai yang diambil dari matriks transaksi dibagi dengan total *input*, masing-masing sektor.

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j} \quad \dots (1)$$

Jika diketahui ada *n* buah sektor dalam suatu ekonomi dan diasumsikan bahwa  $x_{ij} = a_{ij} \cdot X_j$ , persamaan (1) dapat ditulis ulang dengan mensubstitusi  $X_j$  sehingga didapatkan:

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n a_{ij} \times X_j + \sum_{i=1}^n Y_i \quad \dots (2)$$

Persamaan (2) menunjukkan bahwa level produksi untuk setiap sektor *i* tergantung pada level produksi sektor lainnya serta banyaknya permintaan akhir ( $Y_i$ ). Persamaan (2) juga menunjukkan bahwa *output* total industri (*X*) sama dengan jumlah permintaan antara untuk *output*-nya dan total permintaan akhir untuk *output*-nya (*Y*). Persamaan (2) dapat disederhanakan dalam bentuk persamaan matriks berikut

$$\mathbf{X} = \mathbf{AX} + \mathbf{Y} \quad \dots (3)$$

Berdasarkan persamaan (3), solusi yang didapatkan adalah:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{Y} \quad \dots (4)$$

dengan **I** adalah matriks identitas; **A** adalah matriks koefisien teknologi langsung; dan **Y** adalah matriks permintaan akhir.

Kontribusi pariwisata yang dihitung BPS sebelumnya didapatkan dengan memasukkan komponen pengeluaran akhir berupa pengeluaran wisatawan, pengeluaran belanja pemerintah untuk promosi wisata, serta realisasi investasi riil sektor pariwisata ke dalam matriks **Y**. Matriks  $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$  merupakan matriks pengganda *Leontief* yang didapatkan dari tabel *input-output* Indonesia.

Dampak ekonomi yang dihasilkan dari analisis tabel *input-output*, yang kemudian disetarakan menjadi kontribusi pariwisata, merupakan dampak total yang terdiri atas tiga komponen, yaitu dampak langsung (*direct effect*), dampak tidak langsung (*indirect effect*), dan dampak terinduksi (*induced effect*). Artinya, ukuran yang didapatkan bukan hanya dampak langsung dari konsumsi wisatawan, melainkan mengandung estimasi lain yang dapat berdampak pada munculnya overestimasi kontribusi pariwisata. Pada sisi lain, ukuran kontribusi pariwisata seharusnya hanya mencerminkan dampak langsung yang ditimbulkan dari aktivitas pariwisata. Dengan demikian, akan lebih *fair* jika kajian bidang pariwisata dengan menggunakan analisis tabel *input-output* ditujukan untuk menghitung dampak sektor tersebut dalam perkenomian, bukan untuk mengukur kontribusinya (Socci et al., 2016). Tabel 1 menunjukkan perbedaan antara penghitungan kontribusi pariwisata yang dilakukan BPS sebelumnya dengan pendekatan penghitungan yang kini dilakukan.

**Tabel 1.** Perbedaan Penghitungan Kontribusi Pariwisata dengan Kerangka Tabel *Input-Output* dan Kerangka *Supply and Use Tables* (SUT)

Rincian	Pendekatan Tabel <i>Input-Output</i>	Pendekatan <i>Supply and Use Tables</i> (SUT)
Penggunaan cakupan klasifikasi	cakupan klasifikasi berdasarkan klasifikasi agregat dari Tabel <i>Input-Output</i>	mengadopsi klasifikasi industri dan produk pariwisata sesuai IRTS 2008
Kerangka kerja	Tabel <i>Input-Output</i>	<i>Supply and Use Tables</i> (SUT)
Basis data konsumsi pariwisata	mencakup pengeluaran wisatawan; pengeluaran belanja pemerintah untuk promosi pariwisata; dan realisasi investasi riil sektor pariwisata yang selanjutnya digunakan sebagai initial <i>shock</i> dalam analisis dampak tabel <i>input-output</i>	mencakup pengeluaran pariwisata internal, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh wisatawan internal (wisatawan domestik ditambah wisatawan mancanegara)
Metodologi	menggunakan metode analisis dampak multiplier Tabel <i>Input-Output</i>	menggunakan kerangka kerja SUT berdasarkan ukuran Nilai Tambah Bruto Langsung Pariwisata ( <i>Tourism Direct Gross Value Added/TDGVA</i> ) dan Produk Domestik Bruto Langsung Pariwisata ( <i>Tourism Direct Gross Domestic Product/TDGDP</i> )

Sumber: Penulis, 2022

Rekomendasi IRTS dan TSA:RMF menjelaskan bahwa kontribusi pariwisata harus memperhatikan bagaimana produk-produk pariwisata dapat dikonsumsi, baik oleh wisatawan maupun nonwisatawan. Dengan kata lain, IRTS dan TSA:RMF mensyaratkan adanya gambaran yang jelas antara penyediaan produk-produk pariwisata dengan penggunaannya yang dilakukan oleh wisatawan dan diukur dari sisi konsumsi.

Melalui manual IRTS dan TSA:RMF akan dapat ditentukan level penyediaan produk-produk pariwisata yang sejalan dengan nilai konsumsi atas produk tersebut. Hal ini merupakan keunggulan dari metode penghitungan kontribusi pariwisata sebelumnya yang berbasis analisis dampak dari tabel *input-output*. Penghitungan kontribusi pariwisata melalui pendekatan tabel *input-output* lebih menjelaskan dampak dari keberadaan sektor

pariwisata terhadap aktivitas ekonomi lainnya yang terkait dengan sektor pariwisata. Melalui pendekatan *supply-demand*, sebagaimana yang direkomendasikan IRTS dan TSA:RMF, dapat dijelaskan bagaimana kebutuhan permintaan konsumsi wisatawan dapat disediakan oleh industri pariwisata.

Kerangka komprehensif yang dapat menjelaskan keseimbangan penyediaan dan penggunaan barang dan jasa adalah SUT (United Nations, 2018). SUT terdiri atas dua tabel, pertama ialah tabel *supply* (penyediaan) yang menjelaskan bagaimana barang dan jasa dihasilkan oleh setiap lapangan usaha (industri). Tabel *supply* juga menunjukkan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri (impor) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi domestik. Kedua ialah tabel *use* (penggunaan) yang menunjukkan bagaimana penggunaan barang dan jasa pada setiap aktivitas ekonomi. Tabel ini menunjukkan struktur biaya setiap lapangan usaha dalam proses produksinya, serta porsi barang dan jasa yang digunakan dalam aktivitas domestik maupun transaksi luar negeri (ekspor). SUT sangat detil dalam menjelaskan transaksi barang dan jasa antarsetiap industri sehingga melalui *framework* tersebut dapat diturunkan nilai PDB yang konsisten dari tiga pendekatan, yaitu produksi, konsumsi, dan pendapatan.

Pada SUT, sisi kolom dari kedua tabel menunjukkan dimensi lapangan usaha (industri). Sisi baris pada SUT menunjukkan rincian komoditas (produk) barang dan jasa. Karakter SUT menjadikannya *powerful* dalam melakukan analisis dampak dari sisi industri maupun komoditas (Lenzen & Rueda-Cantuche, 2012). Dengan adanya dimensi lapangan usaha dan komoditas tersebut, setidaknya ada dua persamaan keseimbangan yang harus dipenuhi di dalam SUT, yaitu:

$$supply = use \quad \dots (5)$$

nilai barang dan jasa yang disediakan dari produksi dalam negeri dan impor harus sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan.

$$output = input \quad \dots (6)$$

nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri harus sama dengan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan produksi di dalam negeri.

Dalam rangka kebutuhan penghitungan kontribusi pariwisata, SUT selanjutnya didisagregasi sesuai klasifikasi pariwisata. Kolom-kolom pada tabel *supply* maupun *use* didisagregasi ke dalam industri pariwisata dan nonpariwisata. Begitu pula baris pada kedua tabel juga didisagregasi menurut produk pariwisata dan non pariwisata (United Nations & World Tourism Organization, 2010). Tabel 2 menunjukkan klasifikasi produk dan industri pariwisata.

**Tabel 2.** Produk Berkarakter Pariwisata dan Industri Berkarakter Pariwisata

Produk	Industri
1. Jasa akomodasi untuk pengunjung	1. Akomodasi untuk pengunjung
2. Jasa penyediaan makanan dan minuman	2. Aktivitas penyediaan makanan dan minuman
3. Jasa transportasi penumpang kereta api	3. Transportasi penumpang kereta api
4. Jasa transportasi jalan	4. Transportasi jalan
5. Jasa transportasi air	5. Transportasi air
6. Jasa transportasi udara	6. Transportasi udara

Produk	Industri
7. Jasa penyewaan alat transportasi	7. Penyewaan alat transportasi
8. Jasa agen perjalanan dan reservasi lainnya	8. Aktivitas agen perjalanan dan reservasi lainnya
9. Jasa budaya	9. Aktivitas budaya
10. Jasa olahraga dan rekreasi	10. Aktivitas olahraga dan rekreasi
11. Barang-barang khas negara berkarakter pariwisata	11. Barang-barang eceran khas negara berkarakter pariwisata
12. Jasa khas negara berkarakter pariwisata	12. Aktivitas khas negara berkarakter pariwisata lainnya

Sumber: *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*, 2008

Manual IRTS dan TSA:RMF menjelaskan bahwa kontribusi pariwisata dihitung dengan basis konsumsi wisatawan yang terjadi di wilayah ekonomi domestik. Terkait hal ini, konsumsi wisatawan yang digunakan dalam penghitungan kontribusi pariwisata Indonesia merupakan konsumsi pariwisata internal, mencakup konsumsi wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia (termasuk penggunaan maskapai Indonesia untuk perjalanan dari dan ke Indonesia) ditambah konsumsi wisatawan domestik. Nilai konsumsi pariwisata internal selanjutnya akan disandingkan dengan nilai penyediaan produk pariwisata yang dihasilkan dari disagregasi SUT sehingga dapat diturunkan ukuran kontribusi pariwisata, yaitu:

- a. Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Pariwisata (*Gross Value Added Tourism Industry/GVATI*), yaitu total nilai tambah seluruh industri pariwisata yang dihasilkan dalam suatu perekonomian, tanpa memperhatikan apakah nilai tambah industri pariwisata tersebut dikonsumsi atau digunakan langsung oleh wisatawan.
- b. Nilai Tambah Bruto (NTB) Langsung Pariwisata (*Tourism Direct Gross Value Added/TDGVA*), ialah bagian dari nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh industri pariwisata dan industri lainnya yang secara langsung melayani wisatawan sebagai dampak dari konsumsi pariwisata internal.
- c. Produk Domestik Bruto (PDB) Langsung Pariwisata (*Tourism Direct Gross Domestic Product/ TDGDP*), merupakan jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh semua industri sebagai respon terhadap konsumsi pariwisata internal.

Ketiganya menunjukkan besaran kontribusi pariwisata namun indikator yang paling relevan dalam menggambarkan kontribusi pariwisata dalam ekonomi suatu negara adalah TDGDP (United Nations et al., 2010). Indikator ini menyandingkan suplai produk pariwisata dengan nilai konsumsi wisatawan atas produk pariwisata yang disuplai tersebut. Artinya, indikator ini melihat sisi industri penyedia produk pariwisata serta konsumsi wisatawan yang mencerminkan permintaan produk-produk pariwisata. Hubungan agregat ekonomi dengan ketiga ukuran kontribusi pariwisata ditunjukkan pada tabel 3.

**Tabel 3.** Hubungan Agregat Ekonomi dengan Ukuran Kontribusi Pariwisata

Rincian	NTB industri pariwisata (GVATI)	NTB langsung pariwisata (TDGVA)	PDB langsung pariwisata (TDGDP)
NTB (atas dasar harga dasar) berdasarkan <i>supply</i> pengunjung pada industri pariwisata	√	√	√
NTB (atas dasar harga dasar) berdasarkan <i>supply</i> non pengunjung pada industri pariwisata	√	-	-
NTB (atas dasar harga dasar) berdasarkan <i>supply</i> pengunjung pada industri lain	-	√	√
NTB (atas dasar harga dasar) berdasarkan <i>supply</i> non pengunjung pada industri lain	-	-	-
Pajak produk netto dan impor termasuk nilai konsumsi internal (atas dasar harga pembeli)	-	-	√

Sumber: *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework*, 2008

#### Data dan Sumber Data

Data utama dalam menghitung kontribusi pariwisata adalah nilai konsumsi pariwisata yang diturunkan dari nilai pengeluaran wisatawan hasil Survei Wisnus, dan Survei *Outbound* yang dilaksanakan oleh BPS. Selain itu, data pengeluaran wisatawan juga mencakup pengeluaran wisman yang berasal dari survei *Passenger Exit Survey* (PES) yang kemudian diselaraskan dengan data nilai ekspor jasa yang berasal dari Bank Indonesia (BI). Seluruh data pengeluaran wisatawan tersebut menjelaskan ukuran permintaan produk pariwisata. Ukuran suplai pariwisata didasarkan pada tabel SUT yang diperoleh dari BPS.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata dapat dianggap sebagai suatu sektor luas yang merangkul berbagai aktivitas seperti ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya (Sudana, 2013). Pariwisata merupakan aktivitas ekonomi dan sosial yang penting dalam skala lokal maupun global. Pada level kabupaten/kota, pariwisata berdampak pada pengembangan ekonomi daerah seperti ditunjukkan dengan peningkatan kontribusinya terhadap pendapatan daerah (Khoir et al., 2018).

Aktivitas pariwisata melibatkan berbagai lapangan usaha seperti jasa akomodasi, jasa restoran, serta jasa pengangkutan. Pada sisi lain, *demand* industri ini tidak hanya berasal dari wilayah domestik, tetapi juga berasal dari permintaan luar negeri.

Tabel 4 memperlihatkan bahwa baik pengeluaran wisatawan mancanegara maupun pengeluaran wisatawan domestik terus menunjukkan tren peningkatan selama 2016—2019. Selain itu, tipikal pengeluaran keduanya pun didominasi atas produk jasa akomodasi, jasa makan & minum, serta jasa angkutan udara penumpang meskipun porsi konsumsi ketiga produk tersebut berbeda untuk kedua jenis wisatawan tersebut. Konsumsi utama wisatawan mancanegara ialah produk jasa akomodasi sedangkan konsumsi utama wisatawan domestik ialah produk jasa angkutan udara penumpang. Selain itu, porsi pengeluaran wisatawan mancanegara atas ketiga produk tersebut berada di kisaran 60—70 persen. Porsi untuk ketiga produk tersebut di sisi wisatawan domestik berkisar 80 persen. Hal menarik lainnya adalah berdasarkan tabel 4 dapat ditunjukkan bahwa porsi pengeluaran wisatawan domestik atas belanja *souvenir* (barang-barang pariwisata) menempati urutan



keempat. Hal ini menjelaskan karakter wisatawan Indonesia yang kerap berbelanja di tempat wisata.

**Tabel 4.** Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik di Indonesia Tahun 2016—2019 (Milliar Rp)

Rincian	Pengeluaran Wisatawan Mancanegara				Pengeluaran Wisatawan Domestik			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Produk Karakteristik Pariwisata								
Jasa Akomodasi bagi Wisatawan	48.724	60.425	80.397	82.441	232.740	236.764	243.615	264.602
Jasa Makan dan Minum	45.165	53.936	76.557	81.594	324.928	340.977	406.654	423.795
Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	335	378	438	503	1.555	1.864	2.342	2.768
Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	3.750	4.271	4.554	4.922	10.433	13.996	18.546	21.724
Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	2.930	3.332	3.549	3.828	7.800	9.144	9.985	11.404
Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	21.496	24.699	32.634	25.351	366.511	414.164	446.762	510.602
Jasa Persewaan Kendaraan	995	1.118	1.817	1.430	33.817	37.642	43.790	50.296
Jasa Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	32	36	41	46	5.133	5.713	6.572	7.644
Jasa Kebudayaan, Olahraga dan Rekreasi	10.708	12.117	13.592	15.614	7.867	19.781	24.514	25.990
Barang-barang Pariwisata	8.932	9.661	10.551	11.255	76.112	101.442	115.384	120.276
Jasa Pariwisata Lainnya	2.202	2.414	2.638	2.911	7.161	8.020	11.023	11.536
Produk Konsumsi Lainnya	32.398	37.995	43.541	49.397	7.533	3.740	7.945	4.256
<b>TOTAL</b>	<b>177.668</b>	<b>210.382</b>	<b>270.309</b>	<b>279.293</b>	<b>1.081.590</b>	<b>1.193.248</b>	<b>1.337.132</b>	<b>1.454.893</b>

Sumber: *Tourism Satellite Account Indonesia 2016—2019*, 2021

Pariwisata merupakan sektor strategis dimana pengembangan sektor ini dianggap dapat mendorong ekonomi regional termasuk di kawasan ASEAN (Moenir et al., 2021). Sektor ini memberikan manfaat yang nyata dalam pertumbuhan ekonomi (Sut, 2018). Dengan mengetahui ukuran indikator terkait pariwisata, kebijakan pembangunan pariwisata dapat dilakukan lebih terarah. Selain memperkirakan sisi *demand* pariwisata, pengambil kebijakan juga perlu melihat potensi suplai pariwisata negaranya. Tabel 5

menjelaskan nilai penyediaan produk-produk pariwisata selama tahun 2016-2019. Tabel tersebut memperlihatkan bahwa penyediaan produk-produk pariwisata selalu meningkat selama periode tersebut. Hal ini merupakan respon peningkatan konsumsi pariwisata internal yang juga selalu meningkat sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 5 juga menunjukkan perkembangan suplai produk pariwisata yang disandingkan dengan nilai rasio pariwisata. Rasio pariwisata merupakan perbandingan konsumsi pariwisata internal terhadap suplai pariwisata. Semakin besar nilai rasio pariwisata, semakin besar pula konsumsi wisatawan terhadap produk pariwisata tersebut. Secara keseluruhan, terlihat peningkatan nilai rasio produk pariwisata selama tahun 2016—2019. Artinya, porsi wisatawan dalam mengkonsumsi produk-produk pariwisata yang dihasilkan oleh industri pariwisata terus meningkat. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa permintaan terhadap produk pariwisata Indonesia senantiasa meningkat.

Hal lain yang ditunjukkan di Tabel 5 adalah bahwa tidak ada produk pariwisata yang memiliki rasio pariwisata hingga seratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua suplai pariwisata dikonsumsi oleh wisatawan. Suplai produk pariwisata sebagian juga dikonsumsi oleh nonwisatawan. Sebagai contoh, rasio pariwisata untuk produk jasa angkutan rel penumpang yang berada di kisaran 60—70 persen. Artinya, sekitar 30—40 persen suplai angkutan rel penumpang dari PT KAI dikonsumsi oleh nonwisatawan. Pada praktiknya, hal ini dapat digambarkan oleh aktivitas penduduk (nonwisatawan) yang secara rutin berangkat kerja menggunakan moda transportasi ini. Artinya, meski suplai produk pariwisata tidak seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan namun tidak berarti tidak ada pihak yang menggunakannya. Suplai tersebut tetap habis dalam aktivitas ekonomi meski digunakan oleh nonwisatawan. Tabel 5 menunjukkan bahwa rekomendasi IRTS dan TSA:RMF dalam pengukuran kontribusi pariwisata memberikan fleksibilitas analisis sektor pariwisata.

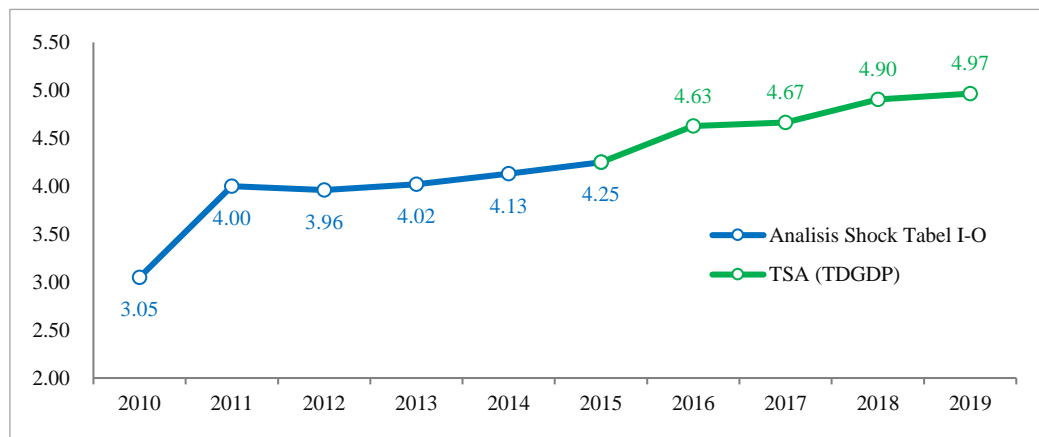
**Tabel 5.** Perbandingan Suplai Domestik Pariwisata dan Rasio Pariwisata Indonesia Tahun 2016—2019

Rincian	2016		2017		2018		2019	
	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)
Jasa Akomodasi bagi Wisatawan	285.474	98,60	309.095	96,15	329.278	98,40	353.605	98,14
Jasa Makan dan Minum	753.943	49,09	801.568	49,27	852.314	56,69	909.855	55,55
Jasa Angkutan Rel untuk Penumpang	2.915	64,85	3.334	67,23	3.986	69,74	4.744	68,96
Jasa Angkutan Darat untuk Penumpang	66.147	21,44	75.438	24,22	81.935	28,19	90.614	29,41
Jasa Angkutan Air untuk Penumpang	28.215	38,03	32.203	38,74	34.936	38,74	38.674	39,39
Jasa Angkutan Udara untuk Penumpang	397.895	97,51	447.587	98,05	485.866	98,67	544.057	98,51
Jasa Persewaan Kendaraan	51.503	67,59	57.861	66,99	64.741	70,44	73.783	70,11

Rincian	2016		2017		2018		2019	
	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)	Suplai Domestik (Milliar Rp)	Rasio Pariwisata (%)
Jasa Agen Perjalanan dan Reservasi Lainnya	6.086	84,88	6.834	84,13	7.633	86,64	8.644	88,96
Jasa Kebudayaan, Olahraga dan Rekreasi	70.028	48,73	79.293	74,78	88.955	78,97	102.233	75,93
Barang-barang Pariwisata	522.206	16,29	566.273	19,62	612.992	20,54	651.030	20,20
Jasa Pariwisata Lainnya	43.468	21,54	47.066	22,17	52.147	26,20	57.047	25,32
Produk Konsumsi Lainnya	21.445.330	0,19	23.508.990	0,18	25.678.424	0,20	27.483.189	0,20
<b>TOTAL</b>	<b>23.673.211</b>	<b>5,32</b>	<b>25.935.543</b>	<b>5,41</b>	<b>28.293.207</b>	<b>5,68</b>	<b>30.317.476</b>	<b>5,72</b>

Sumber: *Tourism Satellite Account Indonesia 2016—2019, 2021*

Gambar 1 menunjukkan perkembangan kontribusi pariwisata Indonesia 2010—2019. Data 2010—2015 merupakan kontribusi pariwisata yang dihitung dengan pendekatan analisis *shock* tabel *input-output*. Data 2016—2019 merupakan hasil penghitungan dengan pendekatan kerangka SUT. Gambar ini memperlihatkan bahwa kontribusi pariwisata Indonesia cenderung meningkat selama periode 2010—2019. Meskipun demikian, perubahan metode penghitungan kontribusi pariwisata berdampak pada munculnya patahan estimasi kontribusi pariwisata di periode transisi, yakni pada tahun 2015—2016. Idealnya, dilakukan *backasting* estimasi kontribusi mulai tahun 2015 ke belakang. Akan tetapi, keterbatasan data, khususnya data suplai pariwisata yang diukur dari SUT, menjadi kendala utama dalam melakukan *backasting* tersebut.



Gambar 1. Kontribusi Pariwisata Indonesia, 2010-2019 (%).

Sumber: Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2017, 2019; *Tourism Satellite Account Indonesia 2016—2019, 2021*

Tabel 6 menunjukkan perkembangan kontribusi pariwisata Indonesia. Terdapat tiga ukuran kontribusi, yaitu GVATI, TDGVA, dan TDGDP. Ketiganya menunjukkan tren

peningkatan kontribusi selama 2016—2019, kecuali GVATI yang sempat menunjukkan penurunan selama 2016—2018. Penurunan tersebut lebih disebabkan oleh pertumbuhan nilai tambah industri nonpariwisata yang lebih cepat dibandingkan nilai tambah pariwisata. Hal ini ditunjukkan dari level GVATI yang selalu tumbuh selama periode tersebut.

Angka GVATI menunjukkan kontribusi nilai tambah industri pariwisata terhadap seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Indikator ini mencerminkan besaran kontribusi pariwisata dari sisi suplai. Indikator ini tidak memperhatikan apakah nilai tambah industri pariwisata tersebut dikonsumsi langsung oleh wisatawan. Dengan kata lain, besaran kontribusi pariwisata yang ditunjukkan pada GVATI lebih mencerminkan kontribusi industri pariwisata. Artinya, besaran ini kurang relevan menggambarkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian karena kurangnya kemampuan GVATI menghubungkan langsung dengan sisi *demand* pariwisata.

Berbeda dengan GVATI yang hanya mengukur kontribusi pariwisata dari sisi suplai, dalam mengukur kontribusi pariwisata, TDGVA dan TDGDP turut mempertimbangkan sisi suplai dan *demand* pariwisata. Oleh karena itu, kedua ukuran tersebut lebih relevan dalam mengukur kontribusi pariwisata. Perbedaan kedua ukuran tersebut, diantaranya adalah bahwa TDGVA tidak mencakup besaran pajak atas produk pariwisata. Konsekuensinya, ukuran kontribusi pariwisata TDGVA didapat dengan membandingkan ukuran tersebut dengan total NTB (atas dasar harga dasar), sedangkan kontribusi TDGDP diukur dengan membandingkannya dengan total PDB (NTB ditambah dengan *net* pajak atas produk).

**Tabel 6.** Perbandingan GVATI, TDGVA, dan TDGDP Indonesia Tahun 2016—2019

Rincian	2016		2017		2018		2019	
	Nilai (Milliar Rp)	%	Nilai (Milliar Rp)	%	Nilai (Milliar Rp)	%	Nilai (Milliar Rp)	%
GVATI	849.353	7,10	925.290	7,08	996.892	7,00	1.085.447	7,15
TDGVA	553.404	4,63	609.711	4,67	698.255	4,90	753.973	4,97
TDGDP	576.758	4,65	635.277	4,67	728.791	4,91	786.182	4,97

Sumber: *Tourism Satellite Account Indonesia, 2016—2019*

Berdasarkan nilai TDGVA, kontribusi pariwisata Indonesia tahun 2016 hingga 2019 menunjukkan peningkatan, yaitu dari 4,63 persen pada tahun 2016 menjadi sebesar 4,97 persen pada tahun 2019. Pada sisi lain, TDGDP mengalami peningkatan dari 4,65 persen di tahun 2016 menjadi 4,97 persen pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan nilai konsumsi pariwisata internal yang juga selalu meningkat selama periode pengamatan. Kondisi ini juga selaras dengan penyediaan produk-produk pariwisatanya yang menunjukkan tren peningkatan.

Tabel 6 menjelaskan bahwa ukuran kontribusi pariwisata dapat dilihat dari tiga pendekatan. Ketiganya menjelaskan isu spesifik tertentu sesuai dengan konsep yang melekat. Hal ini memberikan keleluasaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan analisis kepariwisataan.

## KESIMPULAN

Dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu alternatif prioritas yang dapat dilakukan mengingat keberlangsungan sektor ini tidak difokuskan pada eksploitasi sumber daya alam, melainkan mengoptimalkan daya kreativitas masyarakat serta dan pemberdayaan keindahan alam Indonesia. Indonesia sendiri memiliki beragam budaya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan (Risman et al., 2016) sehingga pengembangan sektor ini sangat berpotensi mendorong perekonomian.

Pengukuran kontribusi pariwisata yang sesuai dengan manual dan rekomendasi internasional akan memudahkan keterbandingan posisi pariwisata Indonesia di tataran global. Selain itu, ukuran kontribusi pariwisata yang dihasilkan juga konsisten dipandang dari sisi penyediaan maupun penggunaannya. Mekanisme ini mampu menjelaskan industri pariwisata yang dominan dalam menyediakan produk pariwisata serta respons wisatawan atas suplai tersebut yang ditunjukkan dengan nilai konsumsinya yang dirinci menurut jenis wisatawan.

Dalam implementasinya, BPS telah mengadopsi manual IRTS dan TSA:RMF serta menggunakan kerangka SUT dalam mengukur kontribusi pariwisata Indonesia. Hal ini memfasilitasi pemerintah dan pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi perencanaan pengembangan pariwisata. Mereka memiliki lebih banyak alternatif dalam menentukan apakah akan mengembangkan industri pariwisata atau menentukan pengembangan produk yang sesuai dengan target wisatawan.

Penyempurnaan metode penghitungan kontribusi pariwisata ini sudah diimplementasikan dalam penghitungan kontribusi pariwisata Indonesia 2016—2019. Dengan demikian, ukuran kontribusi pariwisata yang dihasilkan memiliki keterbandingan pada skala global. Pemerintah juga memiliki opsi yang semakin beragam dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Tabel 5 menunjukkan bahwa penyediaan (*supply*) beberapa produk pariwisata masih minim dikonsumsi oleh wisatawan. Jasa angkutan darat untuk penumpang dan jasa angkutan air untuk penumpang merupakan contoh dari produk pariwisata dengan rasio pariwisata di bawah 50 persen. Artinya, konsumsi wisatawan terhadap kedua produk tersebut dapat terus ditingkatkan mengingat penyediaannya cukup besar. Hal ini menjadi celah bagi pemerintah dalam mendorong peningkatan kontribusi pariwisata dalam PDB Indonesia.

Kontribusi pariwisata Indonesia selama 2016—2019 menunjukkan tren peningkatan, sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan dan nilai pengeluaran wisatawan tersebut. Kontribusi pariwisata Indonesia yang dicerminkan oleh nilai TDGDP menunjukkan bahwa kontribusi di tahun 2016 sebesar 4,65 persen naik menjadi 4,97 persen di tahun 2019.

Percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat ditempuh melalui pengembangan sektor pariwisata. Dengan memperhatikan proporsi pengeluaran wisatawan menurut produk pariwisata, pemerintah dapat menentukan minat dan ketertarikan wisatawan atas penyediaan produk-produk pariwisata Indonesia. Sementara itu, dengan memperhatikan besaran suplai industri pariwisata, pemerintah dapat mengetahui pelaku utama industri pariwisata yang dapat dikembangkan disesuaikan dengan permintaan produk pariwisatanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas) 2017*.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tourism Satellite Account Indonesia 2016-2019*. Badan Pusat Statistik.
- European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations, & World Bank. (2009). *System of National Accounts 2008*. United Nations.
- Khoir, F., Ani, H. M., & Hartanto, W. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2017. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 12(2), 199–206. <https://doi.org/10.19184/jpe.v12i2.8320>
- Lenzen, M., & Rueda-Cantucho, J. (2012). A Note on The Use of Supply-Use Tables in Impact Analyses. *SORT (Statistics and Operations Research Transactions)*, 2(2).
- Malba, E., & Taher, I. M. (2016). Analisis Input-Output Atas Dampak Sektor Pariwisata terhadap Perekonomian Maluku. *Bina Ekonomi*, 20(2), 213–229. <https://doi.org/10.26593/BE.V20I2.2310.213-229>
- Mardianis, & Syartika, H. (2018). Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 53–65. <https://doi.org/10.22212/jekp.v9i1.972>
- Moenir, H. D., Halim, A., & Maharani, A. M. R. (2021). Implementasi ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) dalam Pengembangan Pariwisata Sumatra Barat. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 15(1), 49–63. <https://doi.org/10.47608/jki.v15i12021.49-63>
- Risman, A., Wibhawa, B., & Fedryansyah, M. (2016). Kontribusi Pariwisata Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13622>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Pub. L. No. 18, Lembaran Negara RI No. 10 (2020).
- Socci, C., Ali, Y., Ciaschini, M., Pretaroli, R., & Severini, F. (2016). Estimating the economic impact of tourism industry through the MM approach. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series V: Economic Sciences*, 9, 127–152.
- Sudana, I. P. (2013). Strategi Pengembangan Desa Wisata Ekologis di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *Analisis Pariwisata*, 13(1), 11–31.
- Sut, U. (2018). Economic Aspects of Sustainable Tourism Development in India. *International Journal on Future Revolution in Computer Science & Communication Engineering*, 4(4), 906–908.
- United Nations. (2018). *Handbook on Supply and Use Tables and Input-Output Tables with Extensions and Applications*. United Nations.
- United Nations, Commission of the European Communities, Organisation for Economic Co-operation and Development, & World Tourism Organization. (2010). *Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework 2008*. United Nations.
- United Nations, & World Tourism Organization. (2010). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. United Nations.
- Yakup, A. P. (2019). *Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- Zuhri, Z. (2019). Model Input Output dan Aplikasinya pada Enam Sektor. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.35126/ILMAN.V3I1.36>